

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan pariwisata terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi prioritas dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Serta dalam rangka meningkatkan keunggulan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global, salah satu bentuk pembangunan destinasi pariwisata Indonesia adalah dengan menetapkan wilayah-wilayah pembangunan destinasi pariwisata nasional yang didalamnya dikembangkan kawasan strategis pariwisata nasional berdasarkan pertimbangan memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.

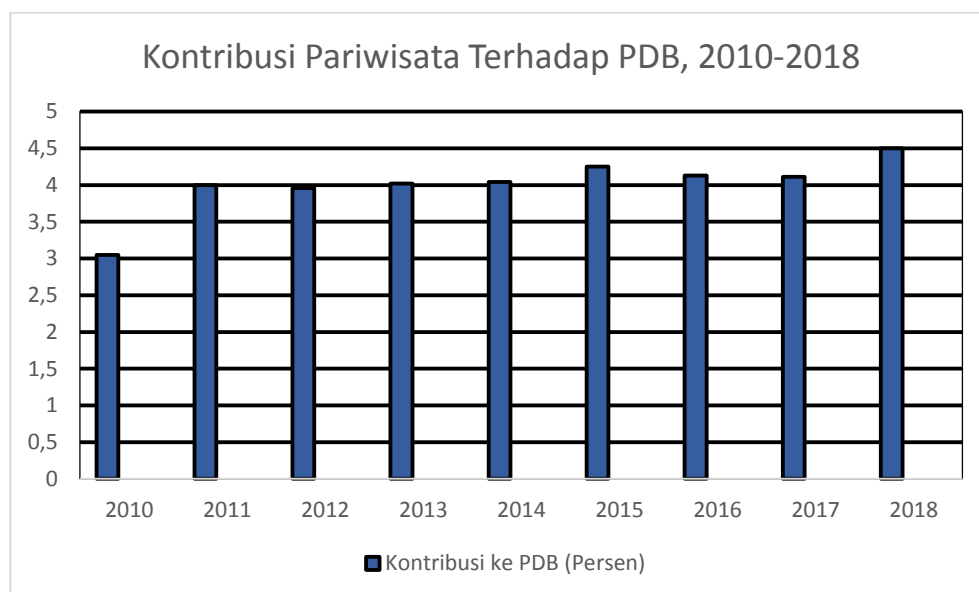
Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kualitas maupun kuantitas kawasan pariwisata tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) terdapat 10 kawasan strategis pariwisata yang menjadi prioritas dalam pembangunan kepariwisataan.

Sebagai bentuk implementasi pengembangan KSPN, dan sesuai amanat dari PP 50 Tahun 2011 tentang RIPARNAS setiap KSPN memiliki rancang induk dan rencana detail KSPN. Rencana induk dan rencana detail ini menjadi sebuah acuan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat dalam pengembangan KSPN. Dalam rencana induk dan rencana detail ini juga akan diatur insiatif-inisiatif perencanaan yang merupakan *quick wins* serta kesepakatan dari pihak-pihak terkait. Pada periode tahun 2013-2014, fokus prioritas lokasi penyusunan rencana induk dan rencana detail didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) kebijakan perwilayahan: mengacu kepada sebaran KSPN di wilayah NKRI; (2) Pengembangan kelembangaan: mengacu kepada adanya kerja sama dengan badan dunia seperti *Internasional Labour Organization (ILO)*, *United Nation-World Tourism Organization (UNWTO)*, atau dengan lembaga *NGO's* lainnya seperti *Swiss Contact*; (3) dukungan lintas sektor: mengacu kepada adanya dukungan Kementrian/Lembaga terhadap sektor pariwisata; (4) tarikan pasar: mengacu kepada adanya permintaan pasar, baik mancanegara maupun nusantara, terhadap daya tarik wisata di kawasan strategis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 adapun 10 KSPN adalah (1) Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), (2) Candi Borobudur (Jawa Tengah), (3) Morotai (Maluku Utara), (4) Pulau Komodo-Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), (5) Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), (6) Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), (7) Danau Toba (Sumatara Utara), (8) Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), (9) Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan (10) Tanjung Lesung (Banten). Zona pariwisata tadi diperuntukan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pemeran serta kegiatan terkait. Indonesia memiliki kekayaan alam yang dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia. Atraksi wisata alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari,

pulau-pulau kecil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan.

Dengan adanya kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maka akan berdampak baik bagi perekonomian di Indonesia, karena pariwisata merupakan sektor unggulan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dijadikannya pariwisata sebagai sektor unggulan, tidak lain karena dampak yang mampu ditimbulkan dari aktivitas pariwisata yang begitu besar terhadap Ekonomi, Sosial, maupun Lingkungan. Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan PDB pariwisata menunjukkan performa yang baik di setiap tahunnya, tercatat kontribusi pariwisata terhadap PDB pada tahun 2010 tercatat berada pada besaran 3,05% kemudian pada 2018 kontribusi pariwisata tercatat berada pada besaran 4,50%.



Sumber: BPS dan Kemenparekraf

Gambar 1.1 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB, 2010-2018 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1 bisa dilihat dari tahun ke tahun kontribusi pariwisata selalu meningkat terhadap PDB. Performansi yang baik ini tidak lepas dari sektor pendukung yang juga mengalami pertumbuhan yang positif, dikarenakan peningkatan

kontribusi pariwisata ke PDB didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara dan investasi. Dampak kegiatan pariwisata terhadap NTB (nilai tambah bruto) pada tahun 2017 mencapai Rp.537, 69 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 4,11 persen dari total PDB nasional.

Tabel 1.1 Dampak Pariwisata terhadap NTB Nasional Menurut Sektor Tahun 2017

SEKTOR	PDB AKIBAT PARIWISATA (MILIAR RP)	NTB NASIONAL (MILIAR RP)	SHARE (%)
Pertanian	69.469,2	1.785.880,7	3,89
Industri Manufaktur	118 .574,4	2.739.415,0	4,33
Listrik,Gas dan Air	4.028,9	172.060,2	2,34
Konstruksi	47.415,8	1.409.833,8	3,36
Perdagangan	40.842,0	1.767.718,3	2,31
Angkutan Kereta Api	1.379,9	9.127,0	15,04
Angkutan Darat	27.531,2	328 .306,7	8,39
Angkutan Air	3.545,3	57.063,3	6,21
Angkutan Udara	18.795,8	220.966,6	8,51
Jasa Penunjang Angkutan	9.069,7	119.721,0	7,58
Penyediaan Akomodasi	59.085,9	91.822,7	64,35
Penyediaan makan minum	51.411,4	295.644,4	17,39
Komunikasi	14.218,9	515 .888,9	2,76
Jasa Lainnya	45. 224,9	2.522 .240,7	1,79
Jumlah	536 .776,5	13.064 .506,5	4,11

Sumber: BPS, 2017

Apabila dilihat menurut sektor yang berkontribusi pada sektor Pariwisata Indonesia sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 diketahui bahwa sektor industri manufaktur menerima dampak terbesar dari kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu mencapai Rp. 118,57 triliun, meskipun kontribusinya hanya 4,33 persen. Sektor lain yang cukup besar menerima dampak kegiatan pariwisata adalah pertanian, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, masing-masing sebesar Rp. 69, 47 triliun, Rp 59, 09 triliun, dan Rp. 51,41 triliun. Jika melihat kondisi provinsi-provinsi yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Kita bisa melihat di setiap

provinsi yang termasuk kedalam KSPN menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

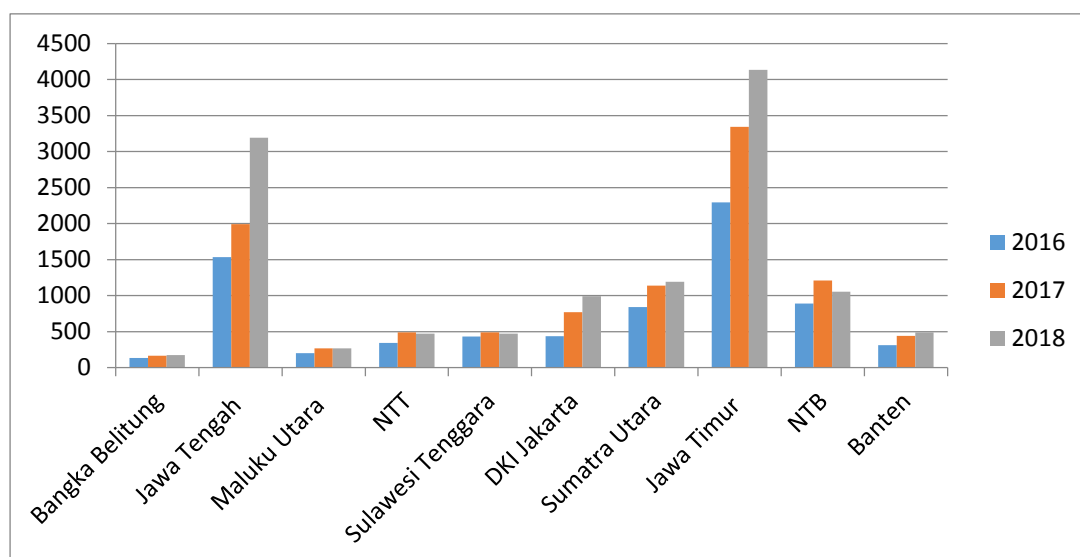
Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar. Oleh karena itu, kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan. Sektor pariwisata merupakan *invisible export* karena kemampuannya mendatangkan devisa. Devisa sektor pariwisata berasal dari belanja wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Statistik kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren yang meningkat selama beberapa tahun terakhir dan mencapai jumlah kunjungan tertinggi tercapai pada tahun 2018, yaitu sebanyak 15,81 juta kunjungan. Selain dari wisatawan mancanegara, pendapatan sektor pariwisata juga berasal dari pengeluaran wisatawan nusantara/domestik. Jumlah perjalanan wisnus selama 2018 mencapai sekitar 303,40 juta perjalanan, dengan rata-rata pengeluaran tiap orang per kunjungan mencapai sekitar 959,18 ribu rupiah.

Peningkatan jumlah wisatawan perlu diimbangi dengan peningkatan penyediaan kamar hotel dan akomodasi Pariwisata lainnya. Wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata tentu membutuhkan tempat menginap. Akomodasi merupakan faktor yang sangat penting bagi wisatawan yang mengharapkan kenyamanan, pelayanan yang baik, kebersihan dan lain-lain. Oleh karena itu, hotel berperan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa banyak wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah.

Pekembangan industri perhotelan, dapat dilihat melalui indikator tingkat penghuni kamar hotel (TPK), jumlah kamar yang terjual/digunakan, rata-rata lamanya tamu menginap serta perkembangan jumlah hotel bintang atau nonbintang. Lama tinggal tamu hotel merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui seberapa tertarik para wisatawan terhadap daerah yang dikunjungi. Semakin lama wisatawan tinggal di

suatu daerah maka ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut memang diminati oleh wisatawan.

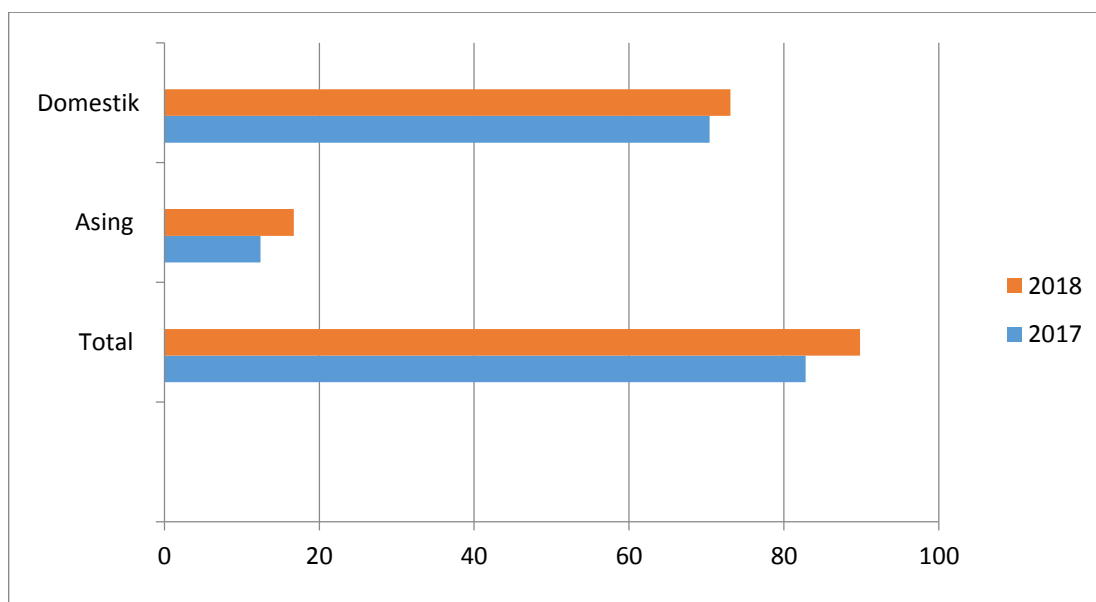
Tingkat hunian kamar hotel juga berperan penting sebagai indikator kesuksesan hotel dalam menjual kamarnya. Semakin tinggi tingkat hunian berarti semakin banyak jumlah kamar yang bisa terjual. Lebih jauh lagi hubungan industri perhotelan dengan pariwisata dari sisi ekonomi dapat dilihat dari ketiga indikator tersebut. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung maka semakin banyak *spending* atau belanja wisatawan di suatu daerah. Lama tinggal wisatawan juga berkontribusi bagi pendapatan daerah. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah maka semakin banyak uang yang dibelanjakan dan berputar di daerah tersebut. Demikian juga dengan tingkat hunian, semakin tinggi tingkat hunian hotel berarti semakin banyak jumlah kamar yang terjual yang artinya semakin banyak pula pajak yang dibayarkan kepada daerah tersebut. Berikut gambar 1.2 perkembangan jumlah hotel di provinsi KSPN tahun 2016-2018.



Sumber: BPS, diolah

**Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Hotel di Provinsi KSPN
Tahun 2016-2018 (Unit)**

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan perkembangan hotel di provinsi yang termasuk kedalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dapat diketahui bahawa kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah hotel perkembangan yang fluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Ada beberapa provinsi yang memiliki jumlah hotel yang cukup banyak antara lain, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah, jika dilihat pada tahun 2018 sebanyak DKI Jakarta 991 ribu, Sumatera Utara 1191 ribu, Jawa Timur 4132 ribu dan Jawa Tengah 3191 ribu. Kemudian ada juga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang relatif meningkat dilihat pada tahun 2017 sebanyak 1211 ribu, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan yaitu menjadi 1055 ribu. Adapun Provinsi yang memiliki usaha akomodasi dan hotel yang masih sedikit antara lain Banten, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.



Sumber: Bps.

Gambar 1.3 Jumlah Tamu Asing Dan Domestik pada Hotel Bintang (Juta/Orang)

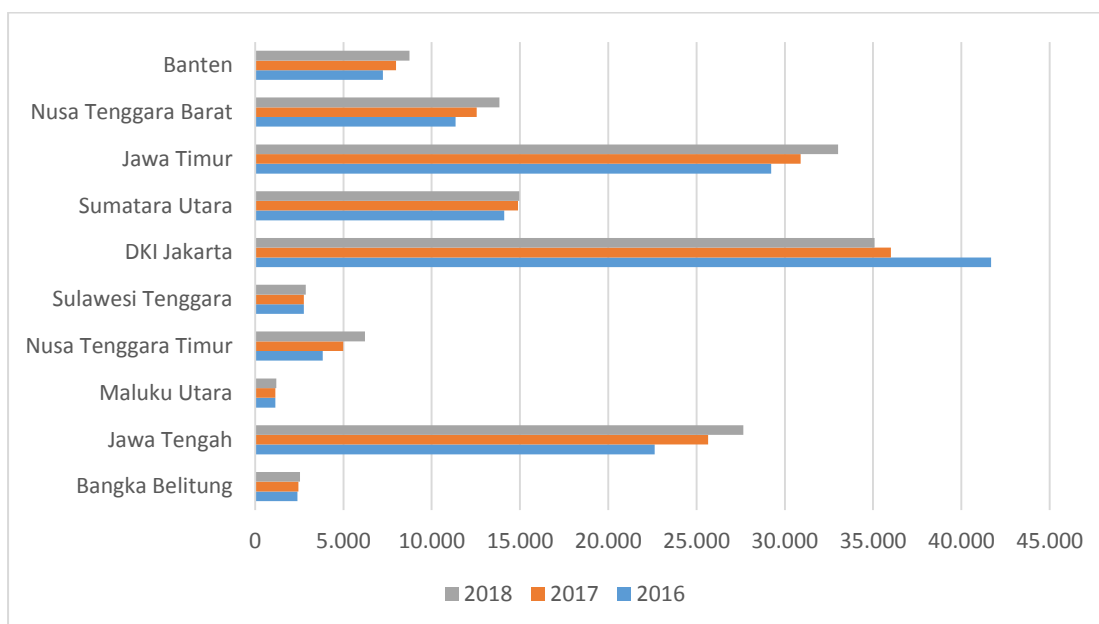
Berdasarkan gambar 1.3 Jumlah tamu yang datang dan menginap pada hotel bintang di Indonesia selama tahun 2018 mencapai 89,80 juta orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 7,00 juta tamu atau 8,46 persen bila dibandingkan dengan

keadaan pada 2017 yang mencapai 82,80 juta orang. Tamu asing yang datang dan menginap pada hotel bintang mencapai 16,70 juta orang atau sebanyak 18,60 persen dari seluruh tamu yang datang dan menginap. Jumlah ini meningkat sebanyak 4,29 juta orang 34,54 persen jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2017 yang mencapai 12,41 juta orang. Kemudian tamu domestik yang datang dan menginap di hotel bintang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 73,10 juta orang. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2017 yang sebanyak 70,38 juta orang, terjadi peningkatan sebanyak 2,72 juta orang atau naik 3,86 persen. Bila dilihat dari urutan lima provinsi yang terbanyak menerima tamu, baik asing maupun domestik, pada hotel bintang selama tahun 2018 adalah DKI Jakarta sebanyak 15,07 juta orang (16,78 persen dari total tamu) terdiri dari 2,27 juta orang tamu asing dan 12,80 juta orang tamu domestik, Bali sebanyak 14,40 juta orang (16,04 persen dari total tamu) terdiri dari 9,25 juta orang tamu asing dan 5,15 juta orang tamu domestik, Jawa Barat sebanyak 12,59 juta orang (14,02 persen dari total tamu) terdiri dari 536,60 ribu orang tamu asing dan 12,05 juta orang tamu domestik, Jawa Timur sebanyak 6,93 juta orang (7,71 persen dari total tamu) terdiri dari 238,70 ribu orang tamu asing dan 6,69 juta orang tamu domestik dan Jawa Tengah sebanyak 6,46 juta orang (7,20 persen dari total tamu) terdiri dari 112,21 ribu orang tamu asing dan 6,35 juta orang tamu domestik.

Selanjutnya, jika dirinci menurut kelas hotel, terjadi kenaikan jumlah tamu di hampir semua kelas hotel, kecuali pada hotel bintang 1. Jumlah tamu terbanyak tercatat oleh hotel bintang 3, yaitu sebanyak 31,41 juta orang (34,98 persen dari keseluruhan), yang terdiri dari 3,98 juta orang tamu asing dan 27,43 juta orang tamu domestik. Jumlah tamu terendah terjadi pada kelas hotel bintang 1 yaitu hanya sebesar 3,94 juta orang (4,39 persen dari keseluruhan kelas hotel).

Akomodasi tidak dapat dipisahkan dari industri pariwisata, tanpa kegiatan kepariwisataan, akomodasi dikatakan lumpuh bilamana yang dimaksud berada di daerah-daerah tujuan wisata. Sebaliknya pariwisata tanpa sarana akomodasi merupakan suatu hal yang tidak mungkin, oleh sebab itu akomodasi merupakan salah satu pokok kepariwisataan yang harus selalu dikembangkan seiring berkembangnya industri pariwisata.

Hotel merupakan salah satu bagian dari usaha pariwisata yang memberikan layanan berupa penyediaan akomodasi beserta pelayanan makanan dan minuman kepada para wisatawan. Hotel juga merupakan usaha yang padat modal dan padat karya, dalam arti memerlukan modal yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang besar pula. Tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan atau pengalaman dipekerjakan dalam berbagai bagian dan jabatan.



Sumber: Statistik Hotel dan Akomodasi

Gambar 1.4 Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Hotel dan Akomodasi (Orang) Tahun 2016-2018

Pada gambar 1.4 secara keseluruhan terlihat bahawa, pada usaha hotel dan akomodasi menyerap jumlah tenaga kerja, berdasarkan jenis pekerjaannya diantaranya

direktur, manager, asisten manager, supervisor, teknis, administrasi, dan lainnya yang berkerja pada usaha hotel dan akomodasi pariwisata, paling banyak jumlahnya berada di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 41.691 orang kemudian di tahun-tahun berikutnya mengalami penuruna pada tahun 2017 sebesar 36.011 orang dan tahun 2018 sebesar 35.091 orang. Pada provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami peningkatan yang meningkat pada setiap tahunnya. Adapun provinsi yang masih rendah dalam penyerapan tenaga kerja yaitu provinsi Maluku Utara. Ini menunjukkan bahwa dalam pariwisata, usaha hotel dan akomodasi merupakan sektor yang mempunyai potensi paling besar dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakan diatas, kajian tentang penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi pariwisata di Provinsi-provinsi yang menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik untuk di teliti. Adapun penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah hotel, jumlah perjalanan wisatawan nusantara, kunjungan wisatawan mancanegara, PDRB perkapita, jumlah hotel dan upah minimum. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA HOTEL DAN AKOMODASI SEKTOR DI PROVINSI-PROVINSI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) PERIODE 2010-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan jumlah perjalanan wisatawan nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, PDRB perkapita, jumlah hotel dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi pariwisata di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Indonesia periode 2010-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel, jumlah perjalanan wisatawan nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, PDRB perkapita, jumlah hotel dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi Pariwisata di 10 provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional periode tahun 2010-2018?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bermaksud memberikan jawaban secara ilmiah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada permasalahan diatas. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah perjalanan wisatawan nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara nusantara, PDRB perkapita, jumlah hotel dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi pariwisata di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Indonesia periode 2010-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah perjalanan wisatawan nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, PDRB perkapita, jumlah hotel dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi pariwisata di 10 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Indonesia periode 2010-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang sejenis berkaitan dengan ekonomi pembangunan serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya terkait dengan analisis jumlah perjalanan wisatawan nusantara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, PDRB perkapita, jumlah hotel dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha hotel dan akomodasi pariwisata.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Sebagai acuan penelitian pada penelitian di masa yang akan datang.